

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi, baik dari segi suku, agama, ras, maupun budaya. Keberagaman ini menjadi karakteristik utama dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang membentuk dinamika sosial yang kompleks. Dalam perspektif sosial, masyarakat yang heterogen memiliki potensi besar dalam menciptakan integrasi sosial, namun juga memiliki potensi konflik yang tinggi apabila tidak dikelola dengan baik (Yuantomoputra & Damanik, 2021). Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan kepentingan yang ada di tengah masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pembangunan dan memperkaya kehidupan berbangsa. Namun, di sisi lain, perbedaan tersebut juga dapat memicu terjadinya gesekan sosial, konflik kepentingan, hingga perpecahan apabila tidak diimbangi dengan sikap toleransi, saling menghormati, dan pengelolaan yang efektif oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, upaya menjaga harmonisasi sosial menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan stabilitas nasional. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial adalah melalui organisasi kemasyarakatan (Ormas). Keberadaan Ormas berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, memperjuangkan kepentingan kelompok, serta berkontribusi dalam pembangunan sosial. Namun, banyaknya jumlah Ormas dengan latar belakang dan tujuan yang beragam juga berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak dibina dan diawasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah melalui kebijakan pembinaan organisasi masyarakat guna memastikan bahwa aktivitas Ormas tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mampu mendukung terciptanya kehidupan sosial yang aman, tertib, dan kondusif.

Keberagaman tersebut mendorong munculnya berbagai bentuk organisasi sosial sebagai wadah partisipasi masyarakat, salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas). Ormas memiliki peran strategis dalam memperkuat

partisipasi masyarakat, meningkatkan solidaritas sosial, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat (Sudama & Sembiring Meliala, 2021). Melalui Ormas, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, menyampaikan kepentingan kelompok, serta berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat. Keberadaan Ormas juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam proses pembangunan dan penyelesaian berbagai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, Ormas berperan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya persatuan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, Ormas dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarkelompok masyarakat yang berbeda latar belakang suku, agama, ras, dan budaya. Dengan demikian, Ormas tidak hanya berfungsi sebagai wadah berhimpun, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Oleh karena itu, keberadaan Ormas perlu didukung melalui pembinaan dan pengawasan yang efektif agar mampu menjalankan fungsi dan perannya secara optimal sesuai dengan tujuan pembentukannya serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks pembangunan sosial, keberadaan Ormas tidak hanya berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial. Ormas dapat berperan dalam penyelesaian konflik, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk (Setianingsih, 2021). Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, Ormas turut membantu pemerintah dalam mengidentifikasi, menyalurkan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat. Peran tersebut menjadi semakin penting mengingat tidak semua kebutuhan dan permasalahan masyarakat dapat dijangkau secara langsung oleh pemerintah. Selain itu, Ormas juga memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persatuan, toleransi, dan kerja sama

antarwarga. Dalam proses penyelesaian konflik sosial, Ormas sering kali berperan sebagai mediator yang membantu membangun komunikasi dan menciptakan kesepahaman antara pihak-pihak yang berselisih. Sementara dalam aspek pemberdayaan masyarakat, Ormas aktif melaksanakan berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pendidikan sosial, bantuan kemanusiaan, serta kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui peran tersebut, Ormas dapat menjadi agen perubahan sosial yang mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri, partisipatif, dan berdaya saing.

Di sisi lain, besarnya peran dan pengaruh Ormas dalam kehidupan sosial masyarakat menuntut adanya pembinaan dan pengawasan yang efektif dari pemerintah. Pembinaan diperlukan agar setiap Ormas dapat menjalankan fungsi dan kegiatannya sesuai dengan tujuan organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan Ormas, upaya menjaga stabilitas sosial, memperkuat integrasi masyarakat, serta menciptakan kehidupan sosial yang aman, tertib, dan kondusif dapat terwujud secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa Ormas memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung keberhasilan pembangunan sosial dan menjaga kondusivitas kehidupan masyarakat

Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan organisasi kemasyarakatan tidak selalu memberikan dampak positif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Ormas juga dapat menjadi aktor dalam konflik sosial, terutama ketika terjadi benturan kepentingan, identitas, maupun kepentingan politik (Andriyani et al., 2021). Konflik tersebut dapat muncul akibat perbedaan tujuan organisasi, persaingan pengaruh di tengah masyarakat, perebutan sumber daya, maupun perbedaan pandangan ideologis yang sulit untuk disatukan. Dalam kondisi tertentu, konflik yang melibatkan Ormas tidak hanya berdampak pada hubungan antarorganisasi, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat secara luas. Selain itu, keberadaan Ormas yang tidak menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Beberapa kasus

menunjukkan adanya Ormas yang terlibat dalam tindakan intimidasi, provokasi, penyebaran ujaran kebencian, hingga tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Kondisi tersebut dapat memicu munculnya ketegangan sosial di masyarakat, terutama pada daerah yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi. Apabila tidak ditangani secara tepat, konflik yang melibatkan Ormas dapat berkembang menjadi konflik horizontal yang mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat.

Di sisi lain, meningkatnya jumlah Ormas di berbagai daerah juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara optimal. Banyaknya Ormas dengan latar belakang, tujuan, dan kepentingan yang beragam memerlukan mekanisme pengelolaan yang efektif agar aktivitas organisasi tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan pembinaan Ormas sebagai respons terhadap berbagai permasalahan tersebut. Menyadari pentingnya permasalahan pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat posisi organisasi masyarakat agar sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Salah satu bentuk komitmen pemerintah adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, termasuk dalam aspek pembinaan secara administratif. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat di tingkat pemerintahan dalam negeri melalui Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Barat guna mencegah potensi konflik, meningkatkan kepatuhan organisasi terhadap regulasi, serta memastikan bahwa keberadaan Ormas dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga kondusivitas kehidupan sosial.

Pembinaan Ormas menjadi langkah strategis untuk meminimalkan potensi konflik sekaligus memperkuat peran Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sosial dan pemeliharaan stabilitas masyarakat. Fenomena konflik

sosial di Indonesia menunjukkan bahwa konflik sering kali dipicu oleh perbedaan identitas sosial, seperti suku, agama, dan kelompok kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu disintegrasi sosial (Hasanah et al., 2021). Sebagai negara yang memiliki tingkat kemajemukan yang tinggi, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara keberagaman dan persatuan. Perbedaan identitas yang seharusnya menjadi kekayaan sosial dapat berubah menjadi sumber konflik apabila disertai dengan sikap intoleransi, diskriminasi, fanatisme kelompok, serta lemahnya komunikasi dan interaksi antar kelompok masyarakat.

Konflik sosial yang muncul akibat perbedaan identitas dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perselisihan antar kelompok masyarakat, konflik antarorganisasi, hingga konflik yang melibatkan unsur keagamaan dan etnis. Konflik tersebut umumnya dipicu oleh adanya perbedaan kepentingan, kesenjangan sosial, perebutan sumber daya, maupun penyebaran informasi yang tidak akurat yang dapat memperkuat prasangka dan stereotip terhadap kelompok tertentu. Apabila konflik tidak ditangani secara tepat, dampaknya tidak hanya mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi juga dapat melemahkan solidaritas sosial serta menghambat proses pembangunan.

Dalam konteks tersebut, upaya menjaga integrasi sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai organisasi sosial, termasuk organisasi kemasyarakatan (Ormas). Keberadaan Ormas dapat berperan sebagai sarana untuk memperkuat toleransi, membangun dialog antar kelompok, serta mendorong terciptanya hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan agar Ormas dapat menjalankan perannya secara konstruktif dalam mencegah potensi konflik sosial dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan pengelolaan yang baik, keberagaman yang dimiliki Indonesia tidak hanya menjadi sumber perbedaan, tetapi juga menjadi modal sosial yang penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan kondusif. Sejalan dengan hal tersebut, data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah

organisasi masyarakat yang sangat besar, yaitu mencapai 554.692 organisasi masyarakat. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan dan pembinaan organisasi tersebut. Besarnya jumlah Ormas mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat untuk berhimpun, berorganisasi, dan berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, keagamaan, pendidikan, kepemudaan, budaya, hingga pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Ormas memiliki posisi yang strategis sebagai sarana partisipasi publik dalam mendukung pembangunan dan penguatan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Namun, banyaknya jumlah Ormas juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh organisasi menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, ketentuan hukum, serta nilai-nilai kebangsaan. Keberagaman karakteristik, latar belakang, dan kepentingan yang dimiliki setiap Ormas menyebabkan proses pembinaan dan pengawasan menjadi semakin kompleks. Tidak semua Ormas memiliki tingkat kepatuhan administrasi yang baik, sehingga masih ditemukan organisasi yang belum terdaftar, tidak aktif melaporkan kegiatan, atau belum memahami secara optimal hak dan kewajibannya sebagai organisasi kemasyarakatan. Selain itu, jumlah Ormas yang besar juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak dikelola secara efektif. Persaingan kepentingan antarorganisasi, perbedaan ideologi, serta konflik internal maupun eksternal dapat menjadi faktor yang mengganggu stabilitas sosial di masyarakat. Diperlukan peran pemerintah yang lebih aktif melalui pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan Ormas agar keberadaan organisasi tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pembinaan yang efektif tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas dan kepatuhan Ormas, tetapi juga untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan mampu mendukung terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, aman, dan kondusif. Dengan demikian, besarnya jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia harus dipandang sebagai potensi sosial yang perlu dikelola secara baik agar dapat menjadi kekuatan dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat integrasi

sosial masyarakat. Keberadaan Ormas pada dasarnya mencerminkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang apabila diarahkan secara tepat dapat menjadi motor penggerak dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat. potensi tersebut tidak akan memberikan dampak yang optimal tanpa adanya pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap Ormas memiliki legalitas yang jelas, tata kelola organisasi yang baik, serta pemahaman yang memadai terhadap peran dan fungsinya dalam masyarakat. Selain itu, pembinaan yang intensif dan berkelanjutan juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas Ormas agar mampu berkontribusi secara konstruktif dalam mendukung program-program pembangunan.



Gambar 1.1 Diagram Data Provinsi Tingkat Ormas Terbanyak

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

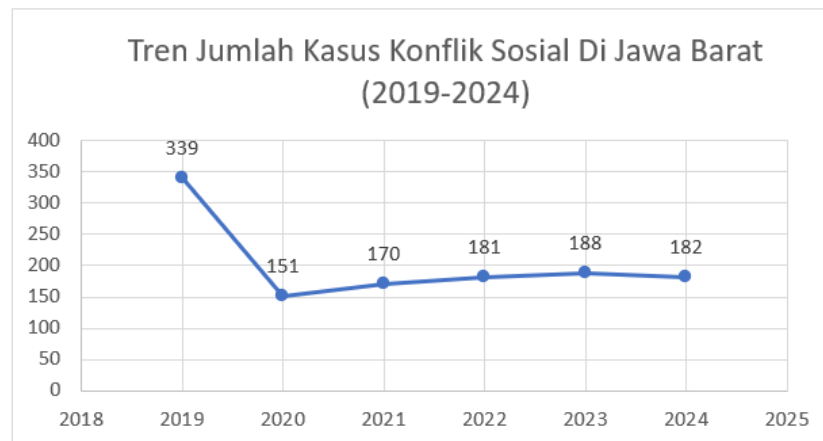
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan jumlah organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 116.627 organisasi masyarakat. Tingginya jumlah tersebut mencerminkan tingginya dinamika sosial masyarakat di Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, kepemudaan, budaya, dan kemasyarakatan. Kondisi ini

mendorong terbentuknya berbagai organisasi masyarakat yang berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi, pengembangan kapasitas masyarakat, serta sarana partisipasi dalam pembangunan daerah.

Besarnya jumlah Ormas di Jawa Barat menunjukkan bahwa organisasi masyarakat memiliki peran yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, Ormas turut berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan solidaritas sosial, serta penyelesaian berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Keberadaan Ormas juga menjadi salah satu bentuk implementasi partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, tingginya jumlah Ormas tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat. Banyaknya organisasi dengan latar belakang, tujuan, dan kepentingan yang beragam memerlukan pembinaan, pengawasan, serta koordinasi yang efektif agar seluruh Ormas dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak dikelola dengan baik, keberagaman organisasi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik kepentingan, perselisihan antarorganisasi, maupun pelanggaran terhadap ketentuan administrasi organisasi.

Tingginya jumlah organisasi masyarakat tersebut juga diikuti dengan meningkatnya potensi konflik sosial yang cukup kompleks. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konflik sosial di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2024. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa dinamika sosial di masyarakat tidak bersifat statis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perbedaan kepentingan antar kelompok, isu politik, kesenjangan sosial ekonomi, hingga kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi antar organisasi masyarakat. Pada periode tertentu, konflik sosial cenderung meningkat seiring dengan menguatnya polarisasi di masyarakat, terutama pada momentum-momentum strategis seperti pemilihan umum atau isu-isu sensitif yang

berkembang di ruang publik. Sementara itu, pada periode lainnya, angka konflik dapat menurun sebagai dampak dari upaya pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta pendekatan persuasif kepada organisasi masyarakat.



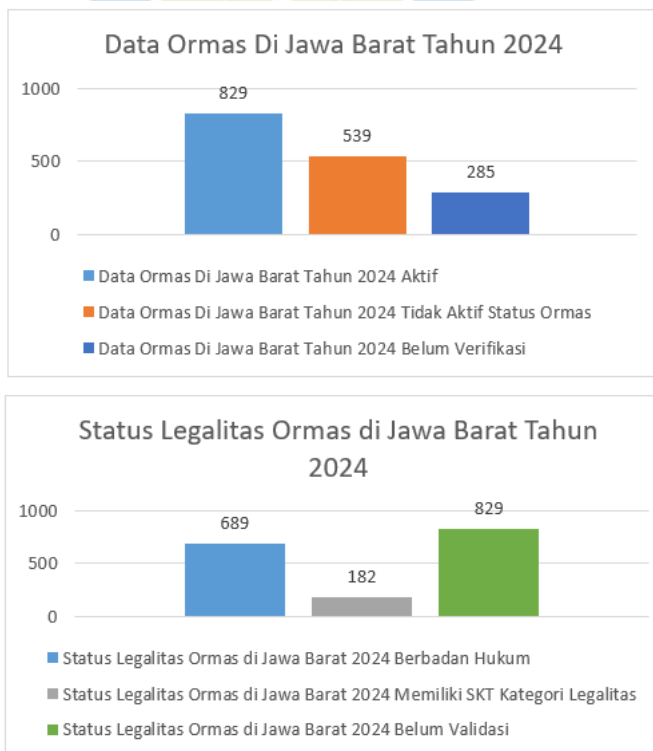
Gambar 1.2 Jumlah Kasus Konflik Sosial di Jawa Barat

Sumber: [Opendata.jabarprov.go.id](https://opendata.jabarprov.go.id)

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan organisasi masyarakat memiliki dua sisi, yaitu sebagai potensi kekuatan dalam mendukung pembangunan daerah, namun juga dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, khususnya melalui instansi terkait, dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap organisasi masyarakat agar dapat menjalankan fungsinya secara konstruktif serta meminimalisir potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Fluktuasi konflik sosial tersebut menunjukkan bahwa stabilitas sosial di Jawa Barat masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran organisasi masyarakat dalam menjaga kondusivitas sosial belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya organisasi masyarakat yang belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai wadah partisipasi publik yang konstruktif, melainkan justru berpotensi menjadi pemicu ketegangan akibat perbedaan kepentingan, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta lemahnya internalisasi nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan.

Selain itu, belum optimalnya peran tersebut juga dipengaruhi oleh terbatasnya kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat, baik dari segi manajemen organisasi, kualitas sumber daya manusia, maupun kemampuan dalam melakukan mediasi dan penyelesaian konflik secara damai. Di sisi lain, koordinasi antara organisasi masyarakat dengan pemerintah daerah dan aparat terkait juga masih perlu ditingkatkan agar tercipta sinergi dalam menjaga stabilitas sosial. Diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam meningkatkan peran organisasi masyarakat, tidak hanya melalui pengawasan, tetapi juga melalui pembinaan, edukasi, serta penguatan kapasitas organisasi. Dengan demikian, organisasi masyarakat diharapkan mampu bertransformasi menjadi agen perekat sosial yang aktif dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif di tengah masyarakat Jawa Barat

Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa masih banyak organisasi masyarakat yang belum tervalidasi dan terverifikasi.



Gambar 1.3 Data Keaktifan Ormas Terdaftar Di Kesbangpol Provinsi

Sumber: Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam aspek administrasi dan pembinaan organisasi masyarakat. Ketidaklengkapan data dan belum terpenuhinya persyaratan legalitas organisasi mengindikasikan bahwa sebagian organisasi masyarakat belum memiliki tata kelola yang baik, khususnya dalam hal pencatatan keanggotaan, struktur kepengurusan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Permasalahan ini juga mencerminkan belum optimalnya proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada organisasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi terkait prosedur pendaftaran dan verifikasi, serta keterbatasan akses informasi bagi organisasi masyarakat, turut menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat validasi dan verifikasi tersebut. Akibatnya, pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan pemetaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap aktivitas organisasi masyarakat secara menyeluruh.

Lebih lanjut, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya organisasi masyarakat yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, lemahnya akuntabilitas, hingga meningkatnya risiko penyalahgunaan organisasi untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah dalam memperkuat sistem administrasi, meningkatkan kualitas pembinaan, serta mendorong organisasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban legalitasnya agar dapat berperan secara optimal dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Ketidakvalidan data organisasi masyarakat tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti lemahnya pengawasan, sulitnya koordinasi, serta meningkatnya potensi konflik sosial di masyarakat. Lemahnya pengawasan terjadi karena pemerintah daerah tidak memiliki basis data yang akurat dan mutakhir untuk memantau keberadaan, aktivitas, serta kepengurusan organisasi masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya, terdapat celah bagi organisasi yang tidak terdaftar atau belum tervalidasi untuk beroperasi tanpa kontrol yang memadai.

Selain itu, kondisi ini juga menyulitkan proses koordinasi antara pemerintah dengan organisasi masyarakat, terutama dalam pelaksanaan program-program

pembangunan, pembinaan, maupun penanganan konflik. Ketika data organisasi tidak jelas atau tidak terverifikasi, komunikasi menjadi tidak efektif karena tidak adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atau representatif dalam organisasi tersebut. Hal ini dapat menghambat sinergi yang seharusnya terjalin antara pemerintah dan organisasi masyarakat sebagai mitra strategis.

Lebih jauh, ketidakvalidan data juga dapat meningkatkan potensi konflik sosial, baik antar organisasi masyarakat maupun antara organisasi dengan masyarakat luas. Organisasi yang tidak memiliki legalitas dan struktur yang jelas cenderung lebih rentan terlibat dalam tindakan yang menyimpang atau provokatif, sehingga berpotensi memicu gesekan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan penataan dan pembaruan data organisasi masyarakat secara berkala, disertai dengan peningkatan sistem verifikasi dan validasi, guna menciptakan tata kelola organisasi masyarakat yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

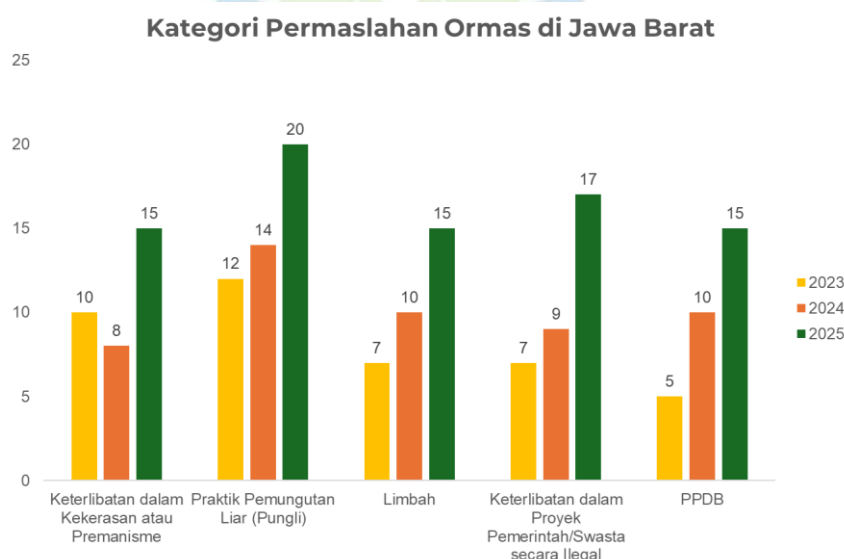
1.1 Tabel Kategori Permasalahan Ormas Di Jawa Barat

No	Wilayah	Periode			Permasalahan
		2023	2024	2025	
1.	Kabupaten Bandung Barat	10	8	15	Keterlibatan dalam Kekerasan atau Premanisme (Pungli), Limbah, Keterlibatan dalam Proyek Pemerintah/Swasta secara Ilegal, PPDB
2.	Kabupaten Bekasi	12	14	20	Keterlibatan dalam Kekerasan atau Premanisme (Pungli), Limbah, Keterlibatan dalam Proyek Pemerintah/Swasta secara Ilegal, PPDB
3.	Kabupaten Kerawang	7	10	15	Keterlibatan dalam Kekerasan atau Premanisme (Pungli), Limbah, Keterlibatan dalam Proyek Pemerintah/Swasta secara Ilegal, PPDB

4.	Kabupaten Purwakarta	7	9	17	Keterlibatan dalam Kekerasan atau Premanisme (Pungli), Limbah, Keterlibatan dalam Proyek Pemerintah/Swasta secara Ilegal, PPDB
5.	Kabupaten Subang	5	10	15	Keterlibatan dalam Kekerasan atau Premanisme (Pungli), Limbah, Keterlibatan dalam Proyek Pemerintah/Swasta secara Ilegal, PPDB

Sumber: Data Sistem Kondusifitas Daerah Bakesbangpol Jabar

Data pada Sistem Informasi Kondusifitas Daerah menunjukkan bahwa terdapat berbagai kategori permasalahan organisasi masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, seperti keterlibatan dalam premanisme, konflik kepentingan, serta aktivitas ilegal lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian organisasi masyarakat tidak hanya menghadapi persoalan administratif, tetapi juga telah memasuki ranah perilaku yang menyimpang dari fungsi dan tujuan pembentukannya sebagai wadah partisipasi masyarakat yang konstruktif.



**Gambar 1.4 Kategori Permasalahan Organisasi Kemasyarakatan
Periode 2023-2025 SIKONDA Bakesbangpol Jabar**

Sumber: Data Sistem Kondusifitas Daerah Bakesbangpol Jabar

Keterlibatan dalam praktik premanisme, misalnya, dapat terlihat dari adanya tindakan pemaksaan, intimidasi, hingga penguasaan wilayah tertentu yang

berpotensi mengganggu ketertiban umum dan rasa aman masyarakat. Sementara itu, konflik kepentingan sering muncul ketika organisasi masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu, baik dalam konteks politik, ekonomi, maupun sosial, sehingga memicu persaingan tidak sehat dan gesekan antar kelompok. Adapun aktivitas ilegal lainnya, seperti pungutan liar atau tindakan di luar ketentuan hukum, semakin memperburuk citra organisasi masyarakat di mata publik.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan pembinaan yang lebih tegas dan terarah dari pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kesadaran hukum dan etika berorganisasi di kalangan anggota organisasi masyarakat agar mampu menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, organisasi masyarakat dapat kembali pada fungsi utamanya sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif

Peningkatan jumlah konflik sosial di beberapa wilayah di Jawa Barat menunjukkan bahwa peran pembinaan organisasi masyarakat belum berjalan secara optimal. Hal ini diperkuat oleh adanya peningkatan jumlah kasus konflik sosial pada periode 2023 hingga 2025, yang mengindikasikan bahwa upaya-upaya preventif dan pembinaan yang telah dilakukan belum mampu secara efektif menekan potensi konflik di tingkat akar rumput. Kenaikan tersebut tidak hanya mencerminkan intensitas konflik yang meningkat, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem deteksi dini, pengelolaan konflik, serta penguatan kapasitas organisasi masyarakat sebagai agen stabilitas sosial. Selain itu, kondisi ini juga dapat disebabkan oleh belum meratanya kualitas pembinaan yang diberikan kepada organisasi masyarakat di berbagai wilayah. Beberapa daerah mungkin telah memiliki sistem pembinaan yang cukup baik, namun di wilayah lain masih terdapat keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun instrumen kebijakan yang mendukung. Akibatnya, organisasi masyarakat belum

sepenuhnya mampu menjalankan perannya sebagai mediator, fasilitator, dan penjaga kondusivitas di tengah masyarakat.

Peningkatan kasus konflik sosial tersebut juga mencerminkan perlunya pendekatan pembinaan yang lebih adaptif dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait, guna menciptakan sistem pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, organisasi masyarakat diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial di Jawa Barat.

Dalam perspektif kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Implementasi yang tidak optimal dapat menyebabkan kebijakan yang telah dirumuskan tidak mencapai tujuan yang diharapkan (Sudama & Sembiring Meliala, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan secara konsisten dan efektif.

Proses implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah sebagai pelaksana utama, hingga masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam proses tersebut, seringkali muncul berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta adanya perbedaan interpretasi terhadap substansi kebijakan. Faktor-faktor ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Kebijakan yang baik sekalipun dapat mengalami kegagalan apabila tidak didukung oleh kondisi yang kondusif atau tidak disertai dengan strategi implementasi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan implementasi yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada hasil, agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Permasalahan implementasi kebijakan pembinaan organisasi masyarakat di Jawa Barat menunjukkan adanya berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Keterbatasan sumber daya manusia terlihat dari belum meratanya kompetensi aparatur dalam melakukan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap organisasi masyarakat. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program pembinaan, terutama dalam menjangkau seluruh organisasi masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah. Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Minimnya alokasi anggaran menyebabkan terbatasnya kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi yang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan. Akibatnya, banyak organisasi masyarakat yang belum mendapatkan pembinaan secara menyeluruh dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan mereka.

Lemahnya koordinasi antarinstansi turut memperburuk kondisi implementasi kebijakan. Kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta lembaga terkait lainnya menyebabkan pelaksanaan pembinaan menjadi tidak terintegrasi. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih program, ketidakefisienan penggunaan sumber daya, serta lambatnya penanganan terhadap permasalahan organisasi masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi sumber daya, serta perbaikan mekanisme koordinasi lintas sektor agar implementasi kebijakan pembinaan organisasi masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap aktivitas organisasi masyarakat, baik dalam aspek administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan. Jumlah aparatur yang terbatas, ditambah dengan beban kerja yang tinggi, membuat proses pembinaan tidak dapat menjangkau seluruh organisasi masyarakat

secara merata dan berkelanjutan. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat dalam efektivitas pembinaan. Tidak semua aparaturnya memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan pendampingan, mediasi konflik, maupun evaluasi terhadap kinerja organisasi masyarakat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pembinaan yang dilakukan bersifat formalitas dan kurang menyentuh permasalahan substantif yang dihadapi organisasi masyarakat.

Akibatnya, lemahnya pengawasan membuka peluang bagi organisasi masyarakat untuk menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, serta penguatan kompetensi teknis dan manajerial, agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat. Anggaran yang terbatas menyebabkan program pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh, baik dari segi jangkauan wilayah maupun intensitas kegiatan yang dilakukan. Akibatnya, hanya sebagian organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan secara optimal, sementara lainnya belum tersentuh secara memadai.

Keterbatasan ini juga berdampak pada minimnya kegiatan pendukung, seperti sosialisasi regulasi, pelatihan peningkatan kapasitas, serta monitoring dan evaluasi yang seharusnya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, upaya-upaya tersebut cenderung dilakukan secara sporadis dan tidak terencana dengan baik, sehingga efektivitas pembinaan menjadi kurang maksimal. Selain itu, keterbatasan anggaran dapat menghambat pengembangan inovasi dalam metode pembinaan, seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk pendataan dan pengawasan organisasi masyarakat. Padahal, inovasi tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di tengah keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih strategis serta optimalisasi

pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar program pembinaan organisasi masyarakat dapat berjalan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Koordinasi antarinstansi yang belum optimal juga menjadi salah satu permasalahan dalam implementasi kebijakan pembinaan organisasi masyarakat. Kurangnya koordinasi menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan serta kurang efektifnya pelaksanaan program pembinaan. Hal ini terlihat dari belum adanya sinkronisasi yang jelas antara peran dan tanggung jawab masing-masing instansi, sehingga program yang dijalankan seringkali tidak terintegrasi dan berjalan secara parsial. Selain itu, lemahnya koordinasi juga berdampak pada kurangnya pertukaran informasi dan data antarinstansi. Padahal, data yang akurat dan terintegrasi sangat penting dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pembinaan organisasi masyarakat. Ketidakterpaduan informasi ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi dalam penanganan permasalahan, serta memperlambat proses pengambilan keputusan di lapangan. Lebih lanjut, kondisi ini berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya, baik dari segi anggaran, waktu, maupun tenaga. Program pembinaan yang seharusnya dapat dilaksanakan secara kolaboratif justru menjadi terfragmentasi, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor melalui forum komunikasi yang efektif, pembagian tugas yang jelas, serta pengembangan sistem informasi terpadu, agar implementasi kebijakan pembinaan organisasi masyarakat dapat berjalan secara sinergis, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam konteks teori implementasi kebijakan, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut menjadi kunci dalam melihat efektivitas implementasi kebijakan pembinaan organisasi masyarakat, karena masing-masing memiliki peran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Faktor komunikasi berkaitan dengan sejauh mana informasi kebijakan dapat disampaikan secara jelas, konsisten, dan tepat sasaran kepada para pelaksana

maupun kelompok sasaran. Komunikasi yang tidak efektif berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga tujuan yang ingin dicapai menjadi tidak optimal. Sementara itu, faktor sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kebijakan. Keterbatasan pada aspek ini akan secara langsung mempengaruhi kapasitas pelaksana dalam menjalankan program pembinaan.

Selanjutnya, faktor disposisi atau sikap pelaksana juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komitmen, integritas, serta pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan di lapangan. Tanpa adanya sikap yang mendukung, kebijakan yang telah dirancang dengan baik sekalipun berpotensi tidak berjalan sesuai harapan. Terakhir, struktur birokrasi berkaitan dengan kejelasan mekanisme, pembagian tugas, serta prosedur kerja dalam organisasi pelaksana. Struktur birokrasi yang tidak efektif dapat menyebabkan hambatan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan. Keempat faktor tersebut perlu diperhatikan secara komprehensif dalam implementasi kebijakan pembinaan organisasi masyarakat. Upaya perbaikan pada masing-masing aspek diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta mendorong tercapainya tujuan pembinaan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, permasalahan implementasi kebijakan pembinaan organisasi masyarakat di Jawa Barat perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Kajian ini menjadi penting agar dapat mengidentifikasi secara komprehensif berbagai kendala yang terjadi, baik yang bersifat internal seperti keterbatasan sumber daya dan kelembagaan, maupun eksternal seperti dinamika sosial dan partisipasi masyarakat.

Melalui kajian yang mendalam, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana kebijakan pembinaan organisasi masyarakat telah dilaksanakan serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun pendukung keberhasilannya. Analisis ini juga dapat memberikan dasar yang kuat

dalam merumuskan strategi perbaikan kebijakan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi publik dan implementasi kebijakan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembinaan organisasi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat peran organisasi masyarakat yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Pembinaan yang optimal diharapkan dapat meningkatkan peran positif organisasi masyarakat dalam kehidupan sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik. Dengan melihat fenomena tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan pembinaan organisasi masyarakat dalam menjaga kondusivitas kehidupan sosial di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya konflik antar organisasi kemasyarakatan di Jawa Barat yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pembinaan oleh pemerintah daerah.
2. Masih adanya organisasi kemasyarakatan yang belum terdaftar secara resmi atau tidak memperpanjang izin, sehingga menyulitkan proses pembinaan dan pengawasan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Belum optimalnya implementasi kebijakan pembinaan Ormas, yang ditunjukkan oleh lemahnya komunikasi kebijakan serta koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaannya.

4. Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas pendukung, yang berdampak pada belum maksimalnya pembinaan Ormas dan terganggunya kondusivitas kehidupan sosial di masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi yang di jalankan oleh aparatur instansi Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dalam pembinaan organisasi masyarakat dalam menjaga kondusivitas kehidupan sosial di Jawa Barat?
2. Bagaimana sumber daya dalam pembinaan organisasi masyarakat dalam menjaga kondusivitas kehidupan sosial yang dilakukan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana disposisi yang dilakukan oleh aparatur instansi Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dalam pembinaan organisasi masyarakat di Jawa Barat?
4. Bagaimana struktur birokrasi dapat berjalan dengan baik dari segi aparatur dan organisasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungan masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komunikasi yang di jalankan oleh aparatur instansi Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dalam pembinaan organisasi masyarakat di Jawa Barat
2. Untuk mengetahui sumber daya (baik sumber daya manusia/aparatur, anggaran, maupun fasilitas pendukung) dalam pembinaan organisasi masyarakat yang dilakukan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui disposisi (sikap dan komitmen) yang dilakukan oleh aparatur instansi Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dalam pembinaan organisasi masyarakat di Jawa Barat

4. Untuk mengetahui struktur birokrasi dapat berjalan dengan baik dari segi aparatur dan organisasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungan masyarakat

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik dan tata kelola organisasi kemasyarakatan di tingkat daerah. Penelitian ini memperkaya literatur dengan menelaah penerapan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dalam konteks pembinaan Ormas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat. Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menguji relevansi teori tersebut dalam lingkungan birokrasi daerah, tetapi juga menambahkan pemahaman empiris mengenai bagaimana faktor sosial, politik, dan budaya lokal memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan dengan memperkenalkan variabel kontekstual khas daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia, dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta karakteristik sosial masyarakat Jawa Barat yang plural. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada isu implementasi kebijakan publik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, maupun studi mengenai hubungan negara dan masyarakat sipil di era desentralisasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah, khususnya bagi Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembinaan Ormas. Temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang selama ini berjalan, terutama dalam aspek komunikasi kebijakan,

koordinasi antarinstansi, dan pemanfaatan sumber daya manusia. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu Kesbangpol dalam memperbaiki sistem pembinaan, memperkuat mekanisme pe Ormas, serta mengoptimalkan sistem digitalisasi data agar proses pembinaan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bagi organisasi kemasyarakatan, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah untuk menciptakan stabilitas sosial yang kondusif. Sementara bagi masyarakat dan akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi empiris untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan pembinaan Ormas di tingkat daerah, sekaligus memperkuat kesadaran publik tentang pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta harmonisasi kehidupan sosial.

F. Kerangka Berfikir

Fenomena banyaknya konflik antar Ormas di Provinsi Jawa Barat serta belum optimalnya proses pembinaan oleh Kesbangpol menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan personel pengawas dan kurangnya sistem informasi yang terintegrasi, yang menyebabkan proses pembinaan Ormas tidak berjalan maksimal. Akibatnya, masih terdapat Ormas yang belum terdaftar, tidak aktif, atau bahkan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Kondisi ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan Ormas oleh Kesbangpol belum efektif.

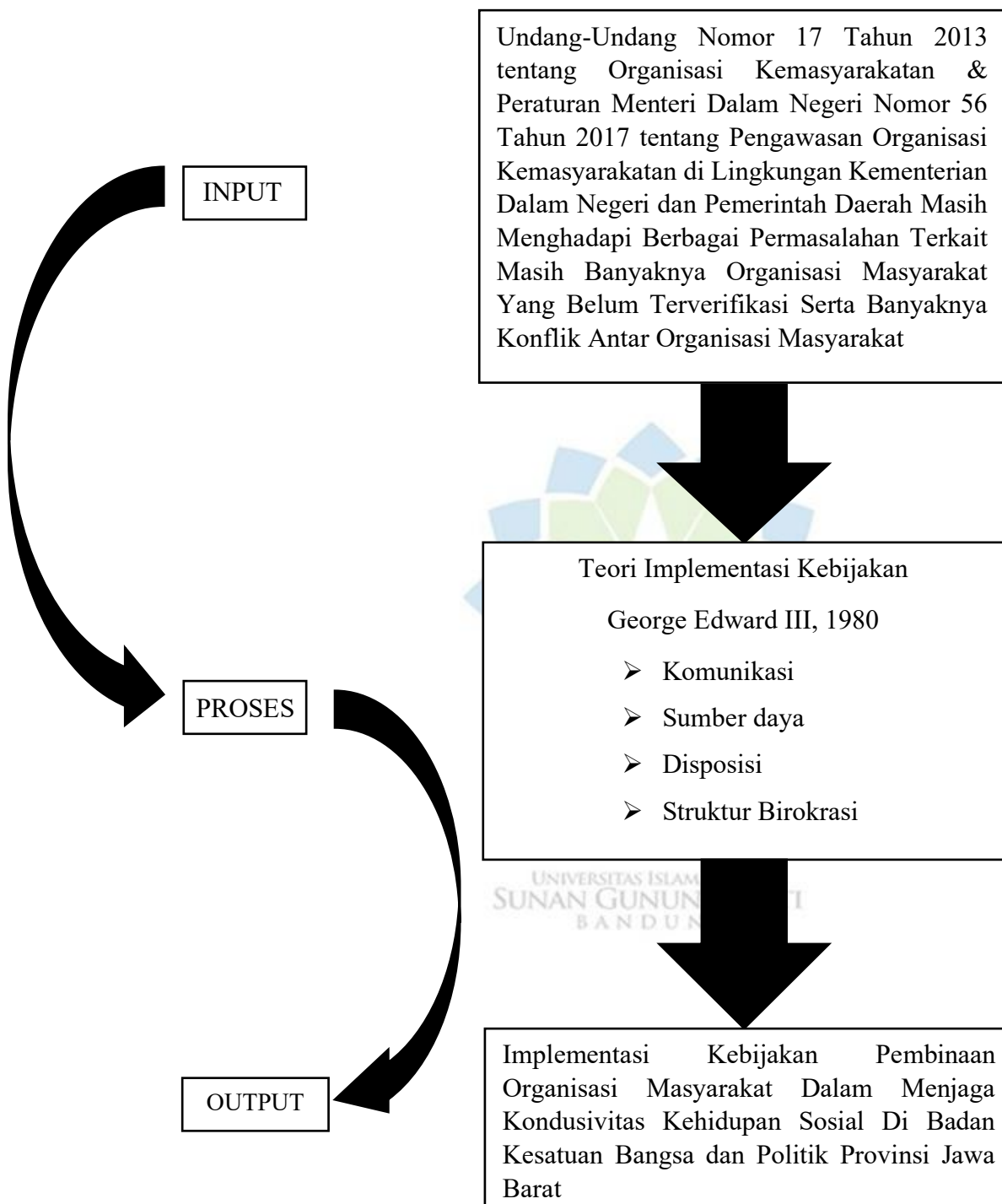
Memahami fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III (Agustino, 2018) yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya manusia (SDM), kewenangan, dan kepatuhan (disposisi).

1. Komunikasi, berperan penting dalam memastikan pesan kebijakan pembinaan Ormas dalam menjaga kondusivitas kehidupan sosial tersampaikan dengan jelas antara Kesbangpol dan organisasi

kemasyarakatan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman, lemahnya koordinasi, serta rendahnya partisipasi Ormas dalam pembinaan.

2. Sumber Daya, yang terbatas serta minimnya dukungan teknologi dan sistem informasi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan pembinaan. Kekurangan pengawas di lapangan membuat data dan pemantauan aktivitas Ormas tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.
3. Disposisi, yang belum dijalankan secara optimal, baik dalam hal pembagian tugas antarinstansi maupun pelaksanaan fungsi koordinasi, menimbulkan tumpang tindih dan memperlambat proses pembinaan.
4. Struktur Birokrasi, menunjukkan sejauh mana Kesbangpol dan Ormas memiliki komitmen dalam menjalankan aturan serta melaksanakan tanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan. Rendahnya tingkat kepatuhan menyebabkan pelanggaran administratif dan potensi konflik sosial semakin besar.

Dengan mengkaji keempat aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyebab belum optimalnya pembinaan Ormas di Jawa Barat serta memberikan gambaran tentang bagaimana Kesbangpol dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pembinaan Ormas melalui komunikasi yang lebih baik, penguatan SDM, optimalisasi kewenangan, dan peningkatan kepatuhan Ormas terhadap regulasi.



Gambar 1.5 Kerangka Berfikir

Sumber: Hasil Penelitian (Data peneliti, 2026)